



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI PENGADUAN MASYARAKAT

SEMESTER I TAHUN 2025

INSPEKTORAT BMKG

Jl. Angkasa I No. 02, Kemayoran, Jakarta 10610
Telp. (021) 424 6321 Fax. (021) 424 6703 P.O Box 3540 Jkt
Website: <http://www.bmkg.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) Inspektorat BMKG Semester I Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan ILHP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai pelaksanaan pengawasan intern yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan BMKG.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendorong peningkatan efektivitas pengawasan internal.

Jakarta, September 2025

Inspektur BMKG



Nasrul Wathon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	4
BAB I. INFORMASI UMUM	5
A. Dasar Hukum	5
B. Struktur Organisasi.....	5
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	5
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	5
BAB II. INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI PENGADUAN MASYARAKAT	6
A. Jumlah dan Jenis Pengaduan Masyarakat	6
B. Status Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	7
BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	7
A. Simpulan	7
B. Hambatan.....	8
C. Rekomendasi.....	8
LAMPIRAN	9

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Pada Semester I Tahun 2025, Inspektorat BMKG telah melaksanakan pengawasan sesuai mandat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Kegiatan pengawasan mencakup audit operasional, reviu laporan, monitoring & evaluasi, pemantauan tindak lanjut, reformasi birokrasi, serta **penanganan pengaduan masyarakat**.

Secara khusus terkait pengaduan masyarakat sampai dengan 08 September 2025, Inspektorat BMKG menerima **5 pengaduan** dengan berbagai jenis pelanggaran, seluruhnya **telah ditindaklanjuti dan 100% kasus dinyatakan selesai**. Substansi jenis pengaduan yang dominan berupa Korupsi/Pungli dan setelah dilakukan telaah dokumen dan verifikasi substansi aduan dinyatakan **tidak benar**.

Hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat dalam menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BMKG. Jenis pelanggaran yang diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat BMKG diantaranya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang
2. Pelayanan Masyarakat
3. Korupsi/ Pungli
4. Kepegawaian/ Ketenagakerjaan
5. Pertanahan/ Perumahan
6. Hukum/ Peradilan dan HAM
7. Kewaspadaan Nasional
8. Tatalaksana/ Regulasi
9. Lingkungan Hidup
10. Umum

BAB I. INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
4. Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat BMKG Tahun 2025.

B. Struktur Organisasi

Inspektorat BMKG dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi Jabatan Fungsional Auditor dan Sub Bagian Tata Usaha, dengan fungsi utama melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

1. Menyediakan gambaran menyeluruh mengenai hasil pengawasan Inspektorat BMKG.
2. Menyajikan informasi perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Menjadi dasar rekomendasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Penanganan pengaduan masyarakat merupakan Program Non-PKPT, sehingga tidak ada target yang ditetapkan dan penugasan dilakukan apabila ada pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan.

BAB II. INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN MELALUI PENGADUAN MASYARAKAT

A. Jumlah dan Jenis Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat BMKG adalah penanganan kasus yang diterima langsung oleh APIP dalam hal ini adalah menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas perintah Inspektur. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap kasus-kasus yang terkait kegiatan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ataupun perbuatan-perbuatan Aparatur Sipil Negara yang memberi citra buruk bagi institusi BMKG.

Jenis pelanggaran yang diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat BMKG diantaranya sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang
2. Pelayanan Masyarakat
3. Korupsi/ Pungli
4. Kepegawaian/ Ketenagakerjaan
5. Pertanahan/ Perumahan
6. Hukum/ Peradilan dan HAM
7. Kewaspadaan Nasional
8. Tatalaksana/ Regulasi
9. Lingkungan Hidup
10. Umum

Berdasarkan hasil dari Tindak Lanjut Penanganan atas Pengaduan Masyarakat Periode Semester 1 Tahun 2025 hingga Tanggal 08 September 2025 diketahui bahwa, terdapat **pengaduan sebanyak 5 kasus**. Sementara jumlah kasus pengaduan masyarakat yang telah **selesai ditindaklanjuti sebanyak 5 (lima) kasus**. Artinya seluruh pengaduan yang masuk telah selesai ditindaklanjuti. Data lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO.	JENIS SUBSTANSI PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN		%
		SEMESTER I 2025		
1.	Penyalahgunaan Wewenang	0	0	
2.	Pelayanan Masyarakat	0	0	
3.	Korupsi/ Pungli	5	100	
4.	Kepegawaian/ Ketenagakerjaan	0	0	
5.	Pertanahan/ Perumahan	0	0	
6.	Hukum/ Peradilan dan HAM	0	0	
7.	Kewaspadaan Nasional	0	0	
8.	Tatalaksana/ Regulasi	0	0	
9.	Lingkungan Hidup	0	0	
10.	Umum	0	0	
Jumlah		5	100	

Sumber: Inspektorat BMKG

B. Status Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Dari **5 kasus pengaduan** pada Semester I Tahun 2025, telah dilakukan analisis dan verifikasi atas dokumen pengaduan dan diketahui bahwa substansi pengaduan dinyatakan **Tidak Benar**. **Seluruh kasus telah selesai ditindaklanjuti** dengan **mengirimkan surat balasan kepada Pelapor**.

BAB III. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Pada Semester I Tahun 2025, Inspektorat BMKG menerima 5 kasus pengaduan masyarakat. Seluruhnya telah melalui proses analisis dan verifikasi dokumen.
2. Hasil verifikasi menyatakan bahwa substansi seluruh pengaduan tidak benar, sehingga tidak terdapat tindak lanjut sanksi maupun tindakan hukum lebih lanjut.
3. 100% kasus telah diselesaikan dengan mengirimkan surat balasan resmi kepada pelapor sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi layanan pengaduan.

B. Hambatan

1. **Kualitas Aduan yang Rendah:** sebagian besar pengaduan tidak dilengkapi bukti yang memadai, sehingga cenderung tidak substansial dan berpotensi menghambat fokus pengawasan pada isu yang lebih strategis.
2. **Risiko Aduan Tidak Benar Berulang:** terdapat kemungkinan pengaduan serupa akan kembali muncul di periode berikutnya, yang jika tidak dikelola baik dapat mengganggu efektivitas kerja APIP.

C. Rekomendasi

1. **Peningkatan Mekanisme Verifikasi Awal:** memperkuat sistem validasi aduan dengan kriteria minimal (contoh: identitas pelapor, bukti awal yang jelas), sehingga hanya pengaduan layak yang masuk tahap pemeriksaan khusus.
2. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** menyusun laporan tren pengaduan setiap semester sebagai dasar strategi pencegahan munculnya aduan palsu serta masukan kebijakan peningkatan integritas layanan publik di BMKG.

LAMPIRAN

Rekap Jenis Pelanggaran dalam Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2025

DASHBOARD INFORMASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BMKG

Rekap Kejadian Pengaduan BMKG Tahun: 2025 Semester 1

Jumlah Kejadian Pengaduan

5

Status TL Proses

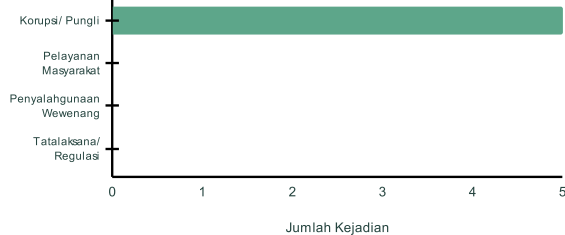
0

Status TL Selesai

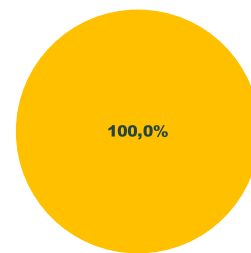
5

Histogram dan Persentase Berdasarkan Jenis Pelanggaran

Histogram Jenis Pelanggaran



Persentase Jenis Pelanggaran



Tindak Lanjut Atas Pengaduan

Mengirimkan Surat Balasan

5

Klarifikasi

0

Tindakan Hukum

0

**LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
UPDATE SEMESTER 1 TAHUN 2025**

Instansi: **BMKG**

NOMOR URUT	NO. & TGL SURAT AGENDA		a. PELAPOR b. TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS TINDAK LANJUT			SANKSI				KETERANGAN
					DALAM PROSES	SELESAI		PP 53/2010	TP/ TGR	PIDANA	LAIN-LAIN	
						BENAR	TIDAK BENAR					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tahun 2025												
1	53/B/KOMPAK/II/2025	a.	KMP	Korupsi/ Pungli			1					Ditindaklanjuti dengan mengirim surat balasan
	03 Februari 2025	b.	PRBM									
2	07/B/MAKKI/II-2025	a.	MKKI	Korupsi/ Pungli			1					Ditindaklanjuti dengan mengirim surat balasan
	04 Februari 2025	b.	PRBM									
3	032/B/DPD-LKPHI/X/2025	a.	LKPHI	Korupsi/ Pungli			1					Ditindaklanjuti dengan mengirim surat balasan
	07 Februari 2025	b.	PRBM									
4	009/JK/ext/ii/2025	a.	JMK	Korupsi/ Pungli			1					Ditindaklanjuti dengan mengirim surat balasan
	10 Februari 2025	b.	PRBM									
5	Nomor:R.1917/LBH-LMP/V/2025	a.	LLMP	Korupsi/ Pungli			1					Ditindaklanjuti dengan mengirim surat balasan
	28 Mei 2025	b.	PKPSG									
							5					

*Update Hingga 08 September 2025